

Siaran Pers

SEMINAR NASIONAL LITERASI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL-EKONOMI

Jakarta, 27 Februari 2018 – Pembangunan sektor sosial-budaya bertemali sangat erat dengan pembangunan sektor ekonomi, yang berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dicapai melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, antara lain kesehatan dan pendidikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas ditandai oleh tingkat pendidikan dan kemampuan literasi, yang memberi sumbangan langsung pada peningkatan kesejahteraan.

“Pendidikan dan literasi di satu pihak serta pembangunan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan di pihak lain adalah variabel yang saling berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Karena itu, pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan dan sektor sosial-budaya, termasuk literasi pada posisi sentral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Bahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang saat ini sedang disusun, literasi untuk kesejahteraan menjadi salah satu kegiatan prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro. Selanjutnya, beliau mengatakan gerakan literasi harus menjadi gerakan kolektif yang bersifat masal, meluas, dan berskala nasional. Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu menjadikan literasi sebagai gerakan sosial sekaligus gerakan kebudayaan, sehingga punya resonansi yang kuat di masyarakat.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menjelaskan seminar ini didorong semangat menumbuhkan budaya baca masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi. Upaya ini diharapkan membawa dampak pada perbaikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Subandi menandatangani agar dapat membangun bangsa dengan kemampuan literasi tinggi, perpustakaan menjadi institusi terpenting yang mempunyai peran sentral dalam membangun *literate society*. Dalam konteks ini, perpustakaan harus dijadikan wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif itulah, perlu menempatkan perpustakaan sebagai institusi pelopor gerakan literasi untuk kesejahteraan.

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menambahkan, literasi kini sudah diperluas melampaui pengenalan abjad dan angka. Dalam pengertian mutakhir, juga mencakup kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan. “Karena itu, literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang punya dampak sosial ekonomi. Literasi juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang membawa kesejahteraan,” pungkas Amich. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, menyampaikan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan, perpustakaan melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. “Transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan,” ungkap Syarif.

Inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Untuk itu, perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatannya yang tinggi di masyarakat. Beliau mencontohkan kerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation, melalui program Perpustakaan Seru (Perpuseru) telah terbina lebih dari hampir 700 perpustakaan di 104 kabupaten di seluruh Indonesia yang memberikan manfaat pada jutaan masyarakat. “Perpustakaan merupakan aset strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Jangkauannya yang luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum,

sehingga semua anggota masyarakat tanpa terkecuali bisa memanfaatkan perpustakaan untuk pengembangan dirinya. Kami sangat mengapresiasi upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk terus mendorong proses transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi salah satu kegiatan Prioritas Nasional pada RKP 2019,” tambah Syarif.

Pegiat Literasi dan Pustaka Bergerak Indonesia Nirwan A. Arsuka menambahkan hal yang diperlukan dalam penguatan literasi adalah penguatan masyarakat madani, perbanyak armada pustaka bergerak untuk menjangkau seluruh warga, sekaligus peningkatan jumlah dan mutu buku yang bisa diedarkan gratis ke seluruh penjuru Indonesia. “Sembako yang bagus mungkin bisa mengenyangkan masyarakat selama seminggu, tapi buku yang bermutu bisa mengenyangkan sekaligus membuat mereka kaya raya dan berdaulat seumur hidup,” jelas Nirwan. Duta Baca Indonesia Najwa Shihab menegaskan akses terhadap bahan bacaan merupakan tantangan fundamental dalam literasi. Tantangan ini dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Teknologi digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi dan bahan bacaan secara mudah dan cepat. Perpustakaan digital adalah salah satu sarannya. Diperlukan inovasi dan cara kreatif untuk memaksimalkan peluang teknologi sebagai metode untuk meningkatkan kegemaran membaca generasi muda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI dan PerpuSeru - Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) menyelenggarakan Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi pada hari ini, Selasa, 27 Februari 2018, di Ruang Djunaedi Hadisumarto (DH) 1-5, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Seminar Nasional dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, dan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, dengan menghadirkan pembicara Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Gerakan Pustaka Bergerak Nirwan A. Arsuka, Direktur Program PerpuSeru-CCFI Eryln Sulistyaningsih, dan Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami. Seminar dipandu oleh jurnalis senior Retno Pinasti. Untuk membahas Tema Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi, para narasumber akan membawakan topik pembahasan, antara lain: Literasi sebagai Gerakan Kebudayaan, Dampak Sosial-Ekonomi Layanan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan Digital dan Generasi Milenial, dan Meningkatkan Akses Literasi untuk Kesejahteraan. Selain menghadirkan narasumber yang kompeten, Seminar Nasional akan dimeriahkan dengan pameran para pengusaha mikro dan kecil binaan perpustakaan daerah, sebagai bukti peran literasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 27 Februari 2018

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id